**B A B I**

**Pendahuluan**

* 1. **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 126 ayat (2) dinyatakan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dan selanjutnya pada pasal 139 dinyatakan bahwa Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sisampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/12/I/Ren.Makro/Bappeda-2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Rencana Kerja yang disusun berisikan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan sehubungan hal tersebut Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020.

* 1. **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021.
    1. **Maksud dan Tujuan**
       1. **Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2020 ini adalah untuk petunjuk arah atau pedoman pelaksanaan tugas pokok Biro Organisasi Biro Organisasi Tahun 2020.

* + 1. **Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Biro Organisasi Tahun 2020 ini adalah untuk untuk menetapkan program/kegiatan Biro Organisasi Tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja-OPD) Biro Organisasi Tahun 2020 ini, disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai berikut :

**Bab I pendahuluan**

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL evaluasi renCANA KERja PERANGKAT DAERAH Tahun lalu**

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
  2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
  4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III tujuan DAN sasaran PERANGKAT DAERAH**

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V penutup**

**B A B II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**

**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Biro Organisasi tahun 2016 – 2021, dan selama tahun 2018 Biro Organisasi telah melaksanakan 45 (empat puluh lima) kegiatan untuk mendukung 10 (sebelas) program. Capaian Kinerja Program Tahun 2018 sesuai dengan Tabel T-C.29 dapat diuraikan sebagai berikut :.

* + - 1. ***Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan*.**

Untuk tahun anggaran 2018 secara umum Biro Organisasi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan namun dari realisasi keuangan kegiatan masih terdapat capaian dibawah 95% tetapi untuk realisasi fisik 100%. Adapun Program/ kegiatan yang tidak tercapai tersebut adalah :

* + - * 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 13.420.959**,-** dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.637.201,- dengan persentase realisasi keuangan 64,36% namun untuk realisasi fisik 100%. Tidak tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan target kinerja adalah tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya dan gaji keTiga Belas dari Honorarium caraka.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tidak terpenuhinya target dari pelaksanaan kegiatan ini disebabkan oleh Biro Organisasi hanya melakukan pembayaran terhadap tagihan jasa komunikasi (Telephone), sedangkan untuk tagihan dari pemakaian sumber daya air dan listrik dibebankan kepada anggaran Biro Umum. Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.876.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 668.939,- dengan persentase 17,26% namun untuk realisasi fisik 100%.

1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 36.320.520,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 27.931.520,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 76,90% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam penyediaan alat tulis kantor.

1. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 64.167.750,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 54.414.750,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 84,80% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

1. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dalam dan luar daerah

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 565.734.680,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 529.139.227,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,53% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kelebihan biaya tiket dan efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaaan perjalanan dinas.

1. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 12.544.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 9.100.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 72,54% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi dalam pemakaian biaya makan minum rapat.

* 1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Meubeleur

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 119.780.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 109.560.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 91,47% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi atau kelebihan biaya pengadaan meubeleur kantor.

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 109.936.412,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 60.986.767,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 55,47% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi dalam pemakaian biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas.

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 22.400.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 17.705.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 79,04% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan berkurangnya kerusakan computer dan jaringan komputerisasi kantor.

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 303.750.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,46% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kelebihan anggaran dalam pengadaan kendaraan dinas.

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 52.386.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 44.100.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 84,18% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kelebihan dalan pengadaan peralatan dan perlengkapan.

* 1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pada program ini hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 59.759.699,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 39.790.900,- yaitu sebesar 66,58% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini dikarenakan tidak banyaknya undangan untuk peningkatan kompetensi aparatur.

* 1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan pada tahun 2018 yang realisasi keuangannya tidak memenuhi target kinerja yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp. 57.081.750,- dan yang terealisasi Rp. 31.740.000,- yaitu sebesar 55,60%. hal ini disebabkan adanya efisiensi pemakaian anggaran.

* 1. **Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**

Pada program ini dari 7 (tujuh) kegiatan yang ada terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi keuangan tidak mencapai target kinerja yakni :

Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian

Kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 45.576.360,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 42.426.950,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,09% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kelebihan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan personal record.

Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 92.143.400,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 83.716.243,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 90,85% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kelebihan dalan pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya kebutuhan lainnya untuk pelaksanaan rakornis.

* 1. **Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan, namun dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi keuangannya masih dibawah 95%, secara umum disebabkan oleh adanya kelebihan dalam pemakaian anggaran. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se- Sumatera Barat

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 104.348.420,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 94.547.050,- dengan persentase 90,61% namun untuk realisasi fisik 100%.

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 116.219.039,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 106.829.500,- dengan persentase 91,92%. Namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

* 1. **Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**

Pada program ini dari 4 (empat) kegiatan dan 2 (dua) kegiatan yang pencapaian target kinerjanya dibawah 95%,yaitu kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 69.053.335,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 62.068.035,- dengan persentase 89,88%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

1. Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 42.488.250,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 40.121.338,- dengan persentase 94,43%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

* 1. **Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan OPD Provinsi Sumatera Barat**

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, namun dalam pelaksanaan masih ada 3 (tiga) kegiatan dalam pencapaian target kinerja realisasi keuangan dibawah 95%. Hal ini disebabkan adanya kelebihan pemakaian anggaran, kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan Monev Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 39.802.200,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 36.802.900,- dengan persentase 92,46%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 81.476.830,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 72.775.600,- dengan persentase 89,32%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

1. Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 161.762.700,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 150.441.100,- dengan persentase 93,00%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

* 1. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pada program ini dari 5 (lima) kegiatan, dan terdapat 4 (empat) kegiatan dalam pelaksanaannya belum mencapai target kinerja realisasi keuangan sebesar 95 %, hal ini secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi pemakaian anggaran. Adapun kegiatan tersebut antara lain:

1. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten /Kota dengan anggaran tersedia sebesar Rp. 39.112.335,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.066.550,- atau persentase sebesar 84,54% namun pencapaian realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 85.298.558,- dan yang terealisasi sebesar 76.514.070,- atau dengan persentase sebesar 89,70% namun untuk realisasi fisik sebesar 100%.
3. Kegiatan Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat, pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 80.462.585,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 70.278.243,- dengan persentase realisasi sebesar 87,34%, namun untuk realisasi fisik sebesar 100%.
4. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota, pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar 112.568.400,- dan yang terealisasi sebesar 103.495.900,- dengan persentase realisasi keuangan 91,94% dan realisasi fisik 100%.
5. ***Program/Kegiatan yang telah memenuhi target yang ditetapkan***

Pada tahun anggaran 2018 program dan kegiatan Biro Organisasi ada yang telah mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Adapun Program/ kegiatan yang telah memenuhi target tersebut adalah sebagai berikut :

* + - * 1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja realisasi keuangan. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp.95.088.337,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 91.600.000,- atau dengan realisasi keuangan sebesar 96,33% dan realisasi fisik 100%.

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peratalan/Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp.2.350.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.350.000,- atau dengan realisasi keuangan sebesar 100% dan realisasi fisik 100%.

1. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD

Kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 20. 452.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 20.079.000,- atau dengan realisasi keuangan sebesar 98,17% dan realisasi fisik 100%.

* + - * 1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang memenuhi target kinerja terdapat yaitu Kegiatan Penatausahaan Keuangan OPD yang pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 146.951.300 dan yang terealisasi sebesar Rp. 145.989.596,- atau dengan persentase realisasi keuangan 99,35% dan persentase realisasi fisik 100%.

* + - * 1. **Program Manajemen Perubahan**

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 184.500.800,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 181.574.600,- atau dengan realisasi keuangan 98,41% dan realisasi fisik 100%.

* + - * 1. **Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**

Pada Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yang pencapaiaan target kinerjanya diatas 95% yaitu kegiatan:

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 67.250.188,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 64.898.750,- atau dengan persentase 96,50% dan persentase realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 71.126.270,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 69.189.900,- atau dengan persentase 97,28% dan persentase realisasi fisik 100%.
3. Kegiatan Monitoring Pengembangan Karier PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 24.960.800,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 24.900.700,- atau dengan persentase 99,76% dan persentase realisasi fisik 100%.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 35,900,400,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 35.425.606,- atau dengan persentase 98,68% dan persentase realisasi fisik 100%.
   * + - 1. **Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yang realisasi target kinerjanya mencapai target yaitu kegiatan :

1. Kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 343.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 337.348.528,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,35% dan realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 120.824.292,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,66% dan realisasi fisik 100%.
3. Kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 138.163.600,- yang terealisasi sebesar Rp. 135.864.450,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,34% dan realisasi fisik 100%.

1. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 108.475.500,- yang terealisasi sebesar Rp. 106.120.850,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,83% dan realisasi fisik 100%.
2. Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 511.133.489,- yang terealisasi sebesar Rp. 489.120.903,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,69% dan realisasi fisik 100%.
   * + - 1. **Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi target kinerjanyaa mencapai target dan adapun kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi SOP pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 112.677.450,- yang terealisasi sebesar Rp. 108.536.450,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,32% dan realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 208.198.412,- yang terealisasi sebesar Rp. 202.387.618,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,21% dan realisasi fisik 100%.
   * + - 1. **Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan OPD Provinsi Sumatera Barat**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi target kinerjanya yang mencapai target dan adapun kegiatan tersebuat adalah kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 238.011.095,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 230.628.700,- atau dengan persentase realisasi keuangan 96,90% dan realisasi fisik 100%.

Berdasarkan uraian diatas terhadap program kegiatan yang tidak tercapai target pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan secara umum adanya penghematan dalam pemakaian anggaran kegiatan serta adanya kebijakan dalam keuangan yang belum membolehkan pembayaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan dengan Rencana Strategis Biro Organisasi tahun 2016-2021 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-Undangan Kelembagaan
3. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik.
4. Meningkatnya tata kelola Organisasi
   1. **Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat bukan merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Ombusdmen Provinsi Sumatera Barat, tingkat kepatuhan Biro Organisasi terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik temasuk Zona Hijau, dan untuk meningkatkan fungsi- fungsi pelayanan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Biro Organisasi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagai petunjuk pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Disamping itu pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi adalah melaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 dan Nomor 12 Tahun 2017 sebagai upaya untuk meningkatkan terciptanya penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Pelayanan lainnya adalah dalam rangka mewujudkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi.

Untuk dapat lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel T-C.30.

* 1. **Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pelayanan Biro Organisasi sebagai salah satu unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat mencakup pelayanan penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah, pelayanan penguatan kualitas ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal-hal kritis dikaitan dengan organisasi perangkat daerah, dan Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran*,* telah dilakukan eveluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
2. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi telah melakukan reviuw terhadap SOP OPD berdasarkan kepada penataan kelembagaan.
3. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
4. Untuk mengetahui permasalahan dalam penyelenggaaan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakann pengelolaan pengaduan berbasis aplikasi LAPOR-SP4N.
5. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
6. Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai pejabat eselon IV di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
8. Untuk terlaksananya reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditindaklanjuti dengan program aksi sebagaimana yang telah diterapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam pernerapan reformasi birokrasi.
   1. **Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain kurangnya informasi dari OPD tentang capaian kinerja Provinsi terkait dengan keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas telah dilakukanperumuskan indikator kinerja yang spesifik dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta pengelolaan data kinerja yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur yang diselaraskan dengan adanya penataan kelembagaan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah masih adanya aparatur kurang memahami akan pentingnya Standar Operasional Prosedur, serta dalam perbaikan SOP sesuai dengan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dan masih adanya aparatur yang tidak memahami bagaimana proses penyusunan Standar Operasional Prosedur. Pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah memberikan bimbingan langsung kepada aparatur dalam tata cara penyusunan Standar Opersional Prosedur.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik ditemui permasalahan atau hambatan – hambatan diantaranya masih adanya pengaduan masyarakat yang berulang – ulang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik dari unsur petugas pelayanan maupun sarana dan prasarana pelayanan, serta masih adanya unit kerja pelayanan publik yang belum menganggar biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, dan pemecahan permasalahan adalah mengingatkan UKPP untuk dapat menganggarkan biaya untuk pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, sehingga pembinaan survey kepuasan masyarakat dapat dilakukan oleh Biro Organisasi dengan baik.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kelembagaan dan analisis jabatan telah dilakukan penyusunan perencanaan kegiatan penataan kelembagaan dan penyusunan dan pembinaan analisis jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan serta pembinaan peningkatan pengetahuan aparatur melalui bulletin/majalah tentang yang memuat organisasi dan aparatur, dan permasalahan yang timbul salah satunya adalah belum adanya Diklat teknis yang memadai bagi analis pada OPD terkait analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan. Usaha pemecahan masalah yang dilakukan adalah melaksanakan bimbingan dan pembinaan ke OPD untuk memantau dan mengumpulkan hasil evaluasi jabatan beserta kelengkapan bahannya dalam memaksimalkan target penyelesaikan kegiatan evaluasi jabatan.

Dari kegiatan yang ada setelah dilaksanakan telah dilakukan review dari rancangan awal kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk penganalisaan kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dalam perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

**2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan Program dan Kegiatan Biro Organisasi pada dasarnya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016 – 2021. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu strategis. Penelaahan usulan program yang dikaitkan dengan kegiatan masyarakat salah satunya adalah yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan kualitas pelayanan publik dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.32.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah**

Sesuai dengan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 salah satunya Misi ke dua yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional diwujudkan dengan melaksanakan dengan perbaikan tata kelola pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah Daerah yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan dan perubahan pola pikir.

Berdasarkan kepada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diseleraskan dengan agenda pembangunan nasional yaitu membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan serta penyempurnaan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara nasional dilaksanakan dengan :

1. Menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, dengan memantapkan implementasi SAKIP.
2. Penerapan *e-government* .
3. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan.
4. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional.
5. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan kepada arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, dengan harapan dapat mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

* 1. Penataan kelembagaan yang dapat mewujudkan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga tidak ada tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih pada masing – masing OPD.
  2. Penataan ketatalaksanaan pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan review/menyusun SOP sesuai kelembagaan OPD berdasarkan peta SOP yang telah ditetapkan.
  3. Penataan sistem manajemen dan pelaporan kinerja.
  4. Penataan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada arah kebijakan yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan.

Meningkatkan komitmen SDM Aparatur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Melaksanakan perubahan pola pikir SDM aparatur menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Penyederhanaan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah serta menghilangkan tumpang tindah fungsi antar OPD.

Penyerderhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik terutama yang menyangkut pelayanan perizinan dan pelayanan dasar.

Melaksanakan review terhadap sejumlah proses pelayanan publik.

Pengunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hal diatas jelas terlihat bahwa penerapan arah kebijakan telah selaras dengan kebijakan nasional, namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan terutama pada tingkat implentasinya di Organisasai Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**3.2**. **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

* + 1. ***Tujuan***

1. Mewujudkan kelembagaan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Terciptanya prosedur dan tata kerja yang efektif dan Efisien dalam Sistem Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas pada unit kerja pelayanan publik (UKPP) Pemerintah Provinsi.
4. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi.
6. Terwujudnya Peningkatan pelayanan aparatur Sekretariat Daerah.
   * 1. ***Sasaran***
7. Meningkatnya kualitas Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi, ukuran dan sinergis.
8. Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan atau bisnis proses pelaksanaan tugas pokok dang sungsi OPD Provinsi Sumatera Barat.
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi.
10. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
12. Meningkatnya pelayanan terhadap aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
    1. **Program dan Kegiatan**
13. **Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan**

Untuk penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2020, disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan Biro Organisasi Tahun 2016 - 2021 serta misi ke-2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional dan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan Biro Organisasi.

1. **Rekapitulasi Program dan Kegiatan**
2. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020

adalah sebanyak 10 program dengan 43 kegiatan.

1. Lokasi program pada umumnya dilaksanakan di Provinsi dan ada beberapa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan ke Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
2. Anggaran yang dibutuhkan berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Total Kebutuhan dana Rp 5.025.000.002,-
4. Rincian Program/kegiatan tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tercantum padaTabel T-C.33. berikut ini.

**B A B IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja Biro Organisasi Tahun 2020 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2020. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2020 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Biro.
2. Pencapaian misi 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rangka menunjang pencapaian misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

Berdasarkan faktor-faktor diatas perumusan/perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
   * 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
     3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
     4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
     5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
     6. Penyediaan Makanan dan Minuman.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   * 1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
     2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
     3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
     5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan kantor
     6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Komputer dan Jaringan Komputerisasi
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
   * 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.**
   * 1. Penatausahaan Keuangan SKPD
     2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
     3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
5. **Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat**
   * 1. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
     2. Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar
     3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat
     4. Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat
6. **Program Manajemen Perubahan**
7. Sosialisasi Reformasi Birokrasi
8. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Sumbar
9. **Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**
10. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Provinsi Sumatera Barat.
12. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
13. Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se Sumatera Barat.
14. Monitoring Dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
15. Bimbingan Teknis Penataan Jabatan
16. Penataan Jabatan Perangkat Daerah
17. **Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.**
18. Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota.
19. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi.
20. Penyusunan Dan Evaluasi SOP pada Pemerintah Prov. dan Kab/Kota.
21. Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik
22. **Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**
23. Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar
24. Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda
25. Monitoring Pengembangan Karir PNS Dilingkungan Pemprov. Sumbar
26. Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar
27. Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
28. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
29. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
30. Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota
31. Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
32. Pembinaan OPD Terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
33. Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi Dan Kabupaten / Kota.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan/direncanakan untuk tahun anggaran 2020 terdiri dari 10 Program dengan 43 kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp. 5.025.000.002,-untuk lebih jelasnya rincian rencana kerja Biro Organisasi tahun 2020 serta besaran pendanaannya dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini :

**B A B V**

**P E N U T U P**

Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2020 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia beserta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

* + 1. Dengan dilaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, perlu segera dilaksanakan:
       - 1. Pengevaluasian perangkat daerah apakah perangkat daerah yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
         2. Penyusunan uraian tugas jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Hal ini penting untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, ukuran dan sinergi.
         3. Review/penyusunan Standar Opersional Prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD
    2. Kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018 telah mendapat predikat **BB**. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang telah dicapai perlu secara konsisten dilakukan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari:
       - 1. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
         2. Perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat.
         3. Monev capaian kinerja perjanjian kinerja Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
         4. Bimbingan teknis sistem AKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota
       1. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun hasil yang dicapai belum dilakukan secara menyeluruh, untuk itu perlu dilaksanakan suatu kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tahun 2020 serta pelaksanaan peningkatan kinerja UKPP dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai perwujudan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan kompetensi penyelenggaraan pelayanan sesuai Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.
       2. Manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokarasi merupakan awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik dan professional secara berkelanjutan. Sosialisasi tentang reformasi birokrasi merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan bagi seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai obyek dan subyek reformasi birokrasi itu sendiri, dan hal ini merupakan perkuatan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ini diajukan untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

****Padang, Januari 2019

**KEPALA BIRO ORGANISASI**

**IRWAN,S.Sos,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680415 198902 1001